

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keamanan Nasional

Keamanan nasional diartikan sebagai suatu konsep yang terjadi perubahan seiring dengan konstelasi politik internasional. Dalam kerangka hukum internasional, keamanan nasional sebagai suatu konsep diserahkan kepada masing-masing negara asalkan tidak menyalahi konsepsi negara demokratis. Dalam ensiklopedia bebas yang dimuat dalam situs wikipedia, keamanan nasional (*national security*) diterjemahkan menjadi suatu konsep yang mana sebuah pemerintahan, bersama dengan parlemen, harus melindungi negara dan warga negaranya terhadap berbagai krisis 'nasional' melalui berbagai proyeksi kekuatan, seperti kekuatan politik, diplomasi, kekuatan ekonomi, kemampuan militer, dll. Sedangkan keamanan dalam konsep tradisional dalam pandangan tradisional mengenai keamanan ini didefinisikan dalam istilah militer, dengan fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional.

Perdebatan menyangkut ruang lingkup keamanan sebagai disiplin ilmu dimana konsep keamanan kemudian menjadi sebuah konsep yang multi interpretatif. Keamanan bukanlah dominasi pertahanan (*defense*) serta perang sebagai konsep utama, namun juga membuka ruang terhadap konsep yang lebih luas yang meliputi isu politik termasuk didalamnya perpaduan antara ancaman militer dan non militer. (Mely Callabero, Anthony, 2006)

Berangkat sebagai konsep yang multitafsir, konsep keamanan akhirnya tidak memiliki definisi yang bersifat universal. Hal ini tidak lepas karena berbagai pengaruh yang melandasi didalamnya. Keamanan sangat dipengaruhi oleh ideologi serta jangkauan waktu yang coba dipaparkan dan

juga oleh faktor unit analisa yang ingin diidentifikasi. Realis mendefinisikan keamanan secara umum sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah kedaulatan serta upaya untuk memproteksi terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pada prakteknya, negara sebagai unit yang bersifat heterogen senantiasa bertindak serta berperilaku mengejar kepentingan nasional diatas segalanya. (P. Savravanamutu, 1996).

Salah satu aspek penting pada keamanan nasional ini adalah bahwa populasi manusia yang berbeda dari negara-negara berdaulat dan internasional masyarakat diakui sebagai objek yang harus dilindungi dari ancaman genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada langkah bertahap menuju pengakuan terhadap masalah yang lebih beragam yang memberikan ancaman terhadap keamanan, pertumbuhan keamanan di bidang keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, energi dan sumber daya keamanan, ketahanan pangan, bio-security, dan keamanan kesehatan. Perluasan masalah keamanan secara resmi diakui ketika para pemimpin negara dan disebutkan dalam berbagai sumber non-militer bahwa adanya ketidakstabilan di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan dan ekologi sebagai ancaman terhadap internasional perdamaian dan keamanan.

Pada tataran kebebasan yang lebih besar, disebutkan bahwa adanya penambahan kemiskinan, penyakit menular yang mematikan, dan degradasi lingkungan kedalam daftar mengenai keamanan dengan alasan bahwa ini dapat memiliki konsekuensi yang sama besarnya. Namun, adanya perhatian pada keamanan global yang masih terkait erat dengan keamanan nasional (seringkali disebut sebagai kekuatan) negara-negara berdaulat, dan ancaman-ancaman keamanan non-tradisional cenderung menjadi signifikan hanya terbatas pada negara-negara yang mengakui hubungan kausal antara ancaman keamanan non-tradisional dan konflik bersenjata potensial ancaman keamanan tradisional internasional.

Melalui Teori keamanan nasional ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian agar dapat lebih fokus dengan mengikuti kondisi keamanan secara global dihadapkan dengan lokus penelitian di wilayah perbatasan Sabang dimana wilayah ini berbatasan dengan tiga negara sekaligus yaitu Malaysia, Thailand dan India di Kepulauan Nikobar yang ada serta ancaman yang ada dihadapkan dengan ketahanan sosial masyarakat pesisir di wilayah perbatasan.

### **2.1.2 Keamanan Maritim**

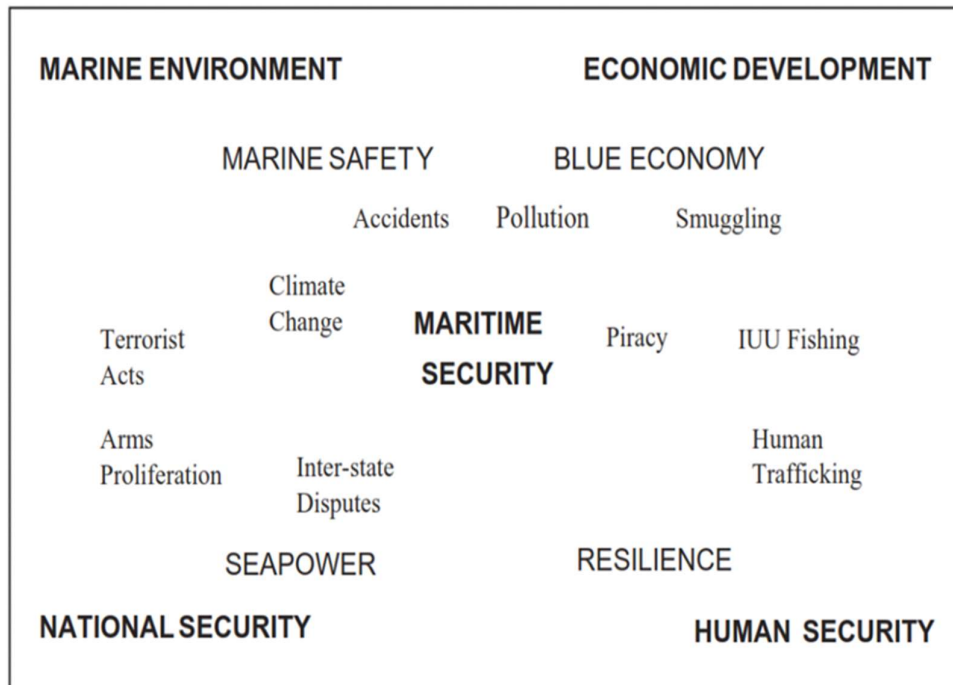
Secara teoritis, keamanan maritim dipersepsikan secara berbeda oleh beberapa tokoh. *Maritime Security* menurut Angkatan Laut Amerika merupakan tugas dan operasi yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara dan sumber daya maritim, mendukung perdagangan lintas laut yang bebas dan terbuka, saat ini pengertian keamanan maritim semakin meluas seiring dengan meningkatnya jenis ancaman. Konsep Keamanan Maritim juga dapat dijelaskan dari ancaman-ancaman yang dihadapi, dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 tentang *Oceans and the Law of the Sea* membedakan 7 (tujuh) jenis ancaman: 1. *Piracy and armed robbery* (Perompakan dan perampokan bersenjata); 2. *Terrorist acts* (Tindakan-tindakan terorisme); 3. *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction* (penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal); 4. *Illicit trafficking in narcotics* (penyelundupan obat-obatan terlarang); 5. *Smuggling and trafficking of persons by sea* (penyelundupan dan perdagangan manusia lewat laut); 6. IUU Fishing (usaha perikanan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan); 7. *Intentional and unlawful damage to the marine environment* (pengerusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja).

Meskipun belum ada ada pemahaman yang utuh terkait dengan keamanan maritim menurut (Octavian et.al, 2014) dalam bukunya Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim, mengungkapkan bahwa

perkembangan tantangan dalam dunia keamanan maritim yang semakin rumit antara ancaman tradisional dan kontemporer (non tradisional) serta semakin luas dengan kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisir dari lintas negara untuk itu dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif untuk mengatasi segala ancaman yang ada. Sejalan dengan pendapat dari (Roell et.al,2013) yang mengungkapkan bahwa keamanan maritim adalah tanggung jawab pemerintah melalui tindakan ataupun kebijakan untuk kepentingan negara.

Menurut (Susanto dan Munaf, 2014), wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu krusial bagi banyak negara di dunia. Stabilitas keamanan maritim sangat diperlukan seluruh negara di dunia dalam rangka menjaga kepentingan nasional bangsa yang berdampak pada pembangunan nasional. Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek keamanan maritim dalam kebijakan nasional (Octavian & Yulianto, 2014)

Keamanan maritim adalah istilah umum yang diinformasikan oleh agenda keamanan untuk mengklasifikasikan isu-isu dalam domain maritim yang sering terkait dengan keamanan nasional, lingkungan laut, perkembangan ekonomi, dan keamanan manusia (Bueger et.al, 2017, Siebels, 2020).

Gambar 2.1. *Maritime Security Matrix*

Sumber: Bueger, 2015

Menurut Bueger, konsep Keamanan Maritim seperti yang sudah diakui dan disepakati oleh dunia Internasional dibagi ke dalam 4 klasifikasi isu yakni : *Sea Power*, *Marine Safety*, *Blue Economy* dan *Human Security* keempat dimensi ini memiliki keterkaitan di dalam Keamanan Maritim. Dengan memetakan isu-isu di laut berdasarkan *matrix* memudahkan untuk memetakan konsep hubungan antar isu yang terjadi di laut dan kaitannya dalam membuat kebijakan untuk penanganannya dan memungkinkan untuk mempelajari jenis-jenis hubungan yang dibangun oleh berbagai aktor keamanan laut. Dari penjelasan matrix diatas memiliki korelasi antara isu *Human Security* yang mendekati *Resilience* dengan konteks yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu ketahanan sosial masyarakat pesisir Sabang dalam menghadapi permasalahan keamanan maritim.

Bueger menyebutkan bahwa keamanan maritim sering dilakukan dengan melihat ancaman yang ada di domain maritim. Keamanan maritime

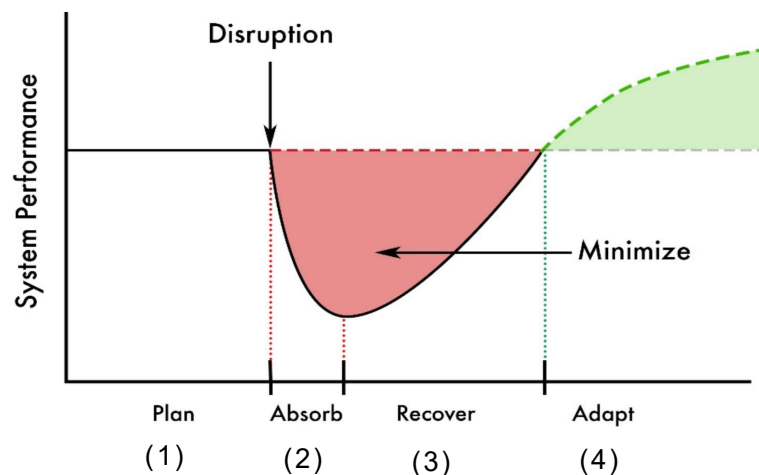
internasional merujuk pada ancaman sengketa batas maritim, terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyearan senjata, penangkapan ikan secara ilegal, kejahatan lingkungan, kecelakaan dan bencana di laut. Kemanan maritime berbicara mengenai kebijakan terkait koordinasi berbagai pihak di domain maritime, berbagai informasi peraturan, pengakan hukum dan pembangunan kapasitas (Bueger, 2015). Melalui konsep Keamanan Maritim ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian agar penelitian ini dapat lebih fokus dengan mengikuti konsep keamanan maritim yang ada serta ancaman yang ada di domain maritim saat ini. Sedangkan konsep penerapan kekuatan pertahanan maritim dilakukan dengan suatu pendekatan yang banyak mengkaji tentang pengembangan dan pemanfaatan sektor-sektor lain dalam lingkup maritim dihadapkan pada kondisi ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan Kota Sabang.

### **2.1.3. Ketahanan**

Ketahanan (*resilience*) system adalah kapasitas dan kapabilitas (suatu system) untuk bertahan dan pemulihan kembali (*recovery*) setelah mengalami shock, trauma, atau bencana dengan yang yang luar biasa (katastropik). Konsep ini secara tradisional dipakai untuk mendalami risiko bencana alam. Sekarang berkembang dan digunakan disiplin lain, pemulihan anak-anak pasca bencana alam. Variabel dalam ketahanan adalah kerentanan (*vulnerability* atau seberapa kuatnya menanggung getaran atau shock atau bencana), risiko, adaptif, pemulihan kembali (*recovery*), dan faktor lain. Mulai dari perencanaan, sampai dengan kejadian, shock, disrupsi, bencana, katastropik, dll, dilanjutkan dengan absorbs (kelenturan untuk berdiri kembali), diikuti *recovery* dan diakhiri dengan adaptasi. Pemulihan dan adaptasi merupakan ketahanan manajemen, and produknya merupakan ketangguhan (*resilient*). Pemulihan semakin cepat dan adaptasi terukur semakin ulet. Variabel lain dalam

kalkulus risiko ketahanan adalah (risiko) potensi bencana (*hazard*). Berbeda halnya dengan isu pertahanan yang lebih konsen pada potensi ancaman. Risiko dihitung mulai saat terjadi kejadian sampai adaptasi selesai, sebagai system bekerja lebih pada bagaimana proses setelah kejadian dan seberapa jauh lingkungan bereaksi.

Ketahanan bisa juga didefinisikan sebagai kesanggupan (*ability*) mengantisipasi, mempersiapkan (*plan*), dan beradaptasi (*adaptive*) dengan perubahan kondisi, kemudian bertahan, merespons, serta pulih kembali (*recovery*) akibat disrupsi (*disrupt*). Disrupsi lebih dialamatkan kepada gangguan berat (*shock, trauma*), bencana yang luar biasa (katastropik) bencana alam, pandemik, terorisme, dll. Ketahanan sebagai kapasitas manusia dan komunitasnya menghadapi goncangan (*shock*) dan tekanan (*stress*) dan mengait dengan upaya merespons dalam persiapannya, saat kejadian, dan pasca pemulihan kembali sampai hidup normal bahkan lebih baik lagi (*adaptasi*). (Alan H Kwok, 2016). Sebagaimana dijelaskan dalam gambar model dasar ketahanan berikut:



**Gambar 2.2 Model Dasar Ketahanan**

Sumber: Konferensi OECD, 2019

Tahapan ketahanan dari kiri ke kanan, mulai tahap (1) perencanaan (*plan*), (2) *absorb*. Perhatikan titik penurunan mulai dari saat disrupsi (bencana, ledakan, insiden atau aksiden termasuk pandemik). Naik kembali saat daya lenting/lentur (*absorbsi*) mulai bekerja menuju garis normal (sesuai performa awal saat sebelum ada insiden atau aksiden seperti saat sebelum ada insiden atau aksiden. Program atau operasi gabungan adalah memulihkan kembali (kalimat programnya memitigasi atau meminimalkan ruang bencana/warna merah muda), sehingga ruang *absorbs* dan pemulihan kembalike tahap (3) (*recovery*) mengecil. Makin sedikit ruang absorpsi dan pemilihan kembali, program ketahanan terhadap system yang dikenai dampak bencana dianggap efektif. Tahapan ke (4) Adaptif akan dimulai saat pemulihan kembali dinyatakan selesai.

Setelah penjelasan model dasar ketahanan diatas, selanjutnya dalam penelitian ini menekankan pada ketahanan Sosial merupakan kemampuan suatu sistem sosial untuk mempertahankan keutuhan atau integrasi sosialnya, pada saat dan/atau setelah mendapat gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam menilai Ketahanan sosial masyarakat terdapat Tiga Kapasitas Ketahanan sosial yang dikemukakan (*Keck dan Sakdapolrak, 2013*) mendefinisikan ketahanan sosial yang terdiri dari tiga dimensi:

1. *Coping capacities*, yaitu kemampuan aktor sosial untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam masalah;
2. *Adaptive capacities*, yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan tantangan masa depan dalam kehidupan sehari-hari;
3. *Transformative capacities*, yaitu kemampuan untuk merangkai lembaga yang mendorong kesejahteraan individu dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan terhadap krisis di masa depan.

Dalam konteks ini, keamanan nasional diidentifikasi sebagai keamanan negara dengan asumsi bahwa negara menghadapi gangguan

atas kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Adanya perspektif baru yang memandang *human security* sebagai unsur dengan melihat keamanan manusia sebagai hal yang paling penting.

Dalam perspektif keamanan nasional ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting dari ancaman berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan. Dihadapkan pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Perbatasan wilayah negara tetangga dan perairan internasional berkonsekuensi pada besarnya potensi ancaman yang harus dihadapi, sehingga masyarakat perlu diberdayakan untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan Indonesia dengan memiliki ketahanan sosial yang baik (Raharjo, 2018). Ketahanan sosial diartikan sebagai kemampuan kelompok atau masyarakat untuk dapat menahan gangguan dari luar atau perubahan perubahan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang dapat merubah tatanan masyarakat atau struktur sosial. (Adger, 2000). Perlu adanya peningkatan ketahanan sosial, terutama yang masih lemah seperti modal fisik, manusia, dan finansial/ekonomi untuk masyarakat di wilayah perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia di wilayah perbatasan. sehingga dapat mewujudkan keamanan nasional yang diharapkan.

Masyarakat dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *society* yang pengertiannya mencakup adanya interaksi sosial, perubahan sosial kebersamaan dan sistem sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Koentjaraningrat, 2013)

Ketahanan Sosial Masyarakat telah menjadi isu kritis di Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya kecenderungan meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat. Tidak saja berpangkal dari makin pudarnya nilai kesetiakawanan sosial yang ditandai dengan merebaknya konflik sosial, tetapi juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial di lingkungannya termasuk rentannya kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh eksternal serta kemampuan masyarakat dalam melakukan berbagai perlawanan terhadap penetrasi budaya asing yang menghancurkan keunikan lokalnya. Kerapuhan ini juga ditandai oleh tumbuhnya berbagai gerakan sosial masyarakat lokal yang mengarah pada gejala disintegrasi (Padmiati, 2013).

#### **2.1.4. Teori Pengelolaan Perbatasan**

Perbatasan wilayah negara, dikonsepsikan sebagai pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Menurut Hayati dan Yani, bahwa secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi yang berada di perut bumi, dan ruang angkasa (udara). (Ahmad, 2007). Posisi perbatasan wilayah negara yang begitu strategis tersebut dipertegas oleh Starke, bahwa perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya sekedar suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. (Starke, 1972).

Teori Pengelolaan Perbatasan Stephen B Jones, dalam bukunya *A Handbook for Statemen, Treaty Editor and Boundary Commissioners*, merumuskan teori terkait pengelolaan perbatasan. Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat

bagian, yaitu *Allocation*, *Delimitation*, *Demarcation* dan *Administration*. Keempat ruang lingkup tersebut saling terkait satu sama lainnya, menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya.

a. *Allocation* (Alokasi)

Alokasi di dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk di mana wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, maka di dalam hukum internasional, telah diatur tentang cara-cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Wilayah yang pasti adalah salah satu unsur esensial dari eksistensi suatu negara supaya dapat diakui secara internasional. Wilayah yang tetap adalah wilayah yang didiami oleh penduduk atau rakyat dari negara itu. Agar wilayah dapat dikatakan tetap, maka harus ada batas-batasnya.

Biasanya wilayah yang didiami penduduk. Terkait dengan Indonesia, maka cakupan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya

Salah satu Perundangan nasional yang terkait dengan wilayah Indonesia, antara lain UU No.17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang mengatur tentang konsepsi *archipelagic state* yang salah satu konsekuensinya adalah Indonesia berhak untuk menentukan titik-titik garis pangkal kepulauan, selain itu UNCLOS juga menjadi landasan hukum terkait penarikan lebar laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berbagai perundangan nasional tersebut di atas merupakan rujukan hukum terkait cakupan wilayah Indonesia.

b. *Delimitation* (Penetapan Batas) Setelah cakupan wilayah diketahui, maka fase selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang overlapping atau harus ditentukan batasnya dengan negara tetangga. Proses ini dilakukan melalui diplomasi perbatasan antar kedua negara yang berbatasan. Dalam konteks Indonesia, penetapan garis batas ini pun harus merujuk pada prinsip *Uti Possidetis Juris* dalam penentuan perbatasan darat, dan rezim hukum laut dalam penentuan perbatasan di laut. Merujuk pada prinsip ini pula bahwa Indonesia mewarisi wilayah jajahan Hindia Belanda, maka garis batas di darat juga mengikuti apa yang sudah diperjanjikan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

c. *Demarcation* (Penegasan Batas) Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh pemerintah negara yang sering berbatasan. Dalam konteks ini perbatasan sudah didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda atau patok perbatasan, baik perbatasan alamiah maupun buatan (artifisial). Hal itu sejalan dengan pengertian perbatasan itu Elaborasi realtif memadai tentang Aspek penegasan batas (*demarcation*). Patok-patok perbatasan tersebut dibuat dalam beberapa versi sesuai dengan jangkauan atau jarak antarpatok perbatasan tersebut.

d. *Administration* (Management) Pembangunan Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik menurut *theory of boundary making*, kegiatan administration atau management pembangunan perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan politik, sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi, dan

kegiatan administrasi atau management berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan, karena tahap ini merupakan bagian tindak lanjut dari pemisahan hak dan kewajiban antar negara akibat munculnya perbatasan wilayah. Indonesia sendiri, pemerintah telah menjalin berbagai kerjasama dengan Pemerintah negara tetangga tentang hal-hal tersebut.

Berkaitan dengan penelitian yang dibahas, pengelolaan perbatasan dalam hal ini diarahkan kepada adanya permasalahan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang yang telah dijelaskan sebelumnya dan kerjasama yang dilakukan sebagai solusi atau upaya membangun konsep untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di perbatasan dilakukan dengan konsep *Triplehelix*. (Carayannis et al, 2012) berfokus pada aspek budaya dan berbagi aspek-aspek ini ketika mengacu pada peran publik sebagai heliks keempat dari sistem inovasi. "Subsistem keempat, masyarakat berbasis media dan berbasis budaya, mengintegrasikan dan menggabungkan dua bentuk 'modal'. Di satu sisi, helix ini memiliki, melalui masyarakat berbasis budaya (misalnya: tradisi, nilai, dll.).

Kunci utama pengembangan Kota Kreatif adalah keterlibatan lintas pelaku/aktor dalam berbagi tugas dan peran. Aktor atau stakeholders dalam kota kreatif biasa disebut dengan *Triplehelix*. Konsep *Triplehelix* merupakan suatu pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari tiga aktor yaitu akademik, Bisnis dan pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan. inilah yang nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk membangun konsep dalam mempercepat peningkatan ketahanan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar khususnya di wilayah perbatasan kota Sabang.

### 2.1.5. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan suatu set hubungan antar pihak yang berperan sebagai penentu kebijakan. Para pihak yang dimaksud jelas memiliki kewenangan (*power*) untuk menentukan tujuan-tujuan tertentu serta merumuskan cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2000:15) berpendapat kebijakan sebagai “*a projected program of goals, values and practices.*” Artinya, di dalam suatu kebijakan itu terdapat suatu konsepsi program yang mempunyai tujuan tertentu serta ukuran-ukuran pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks inilah kebijakan pelayanan publik di bidang tertentu dapat dianggap sebagai suatu rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan, sementara itu kebijakan publik yang dirumuskan dan selenggarakan oleh pemerintah tentu mengandung dampak tertentu terhadap kepentingan publik atau masyarakat.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, salah satu model implementasi kebijakan publik menurut Menurut George Edward III dalam (Widodo, 2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

- a. **Komunikasi** Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam (Widodo, 2010) perlu disampaikan

kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **b. Sumberdaya**

Edward III dalam (Widodo, 2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

### 1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”

### 2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### 3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam (Widodo, 2010) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan

memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

#### 4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

### c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

#### 1) Pengangkatan birokrasi.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

**d. Struktur birokrasi**

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2005) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan teori Edward III dalam (Widodo, 2010) tersebut, dengan alasan bahwa dalam teori tersebut sudah terdapat indikator-indikator yang dapat mendukung implementasi program Spotmar TNI AL yang dalam meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah Perbatasan Sabang untuk selanjutnya diharapkan dapat melihat kegagalan ataupun keberhasilan implementasi program tersebut.

Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan dapat juga dikatakan sebagai penyelenggaraan suatu sistem manajemen kawasan perbatasan. Penyelenggaraan sistem manajemen ini tentu didasarkan pada suatu kebijakan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Indonesia mempunyai 92 pulau kecil terluar yang perlu untuk dikelola dan diamankan, 12 pulau di antaranya memiliki kerawanan atau berpotensi untuk menjadi sumber konflik, sehingga eksistensinya perlu dipertahankan karena merupakan wujud dari kedaulatan negara.

TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI, berperan sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut menjalankan

tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 9 huruf (e), bahwa tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) melalui Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), yang salah satu kegiatannya adalah Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut (Binwiltasla) dengan meningkatkan ketahanan masyarakat agar terwujudnya Ruang, Alat, Kondisi Juang yang tangguh dan kemandirian TNI Angkatan Laut dengan rakyat di wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar yang dalam hal ini menjadi tugas dari Spotmar TNI AL. Selanjutnya diperlukan implementasi kebijakan sebagai suatu keputusan yang dapat mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian dicarikan berbagai cara penyelesaiannya yang akan berguna untuk mengurangi gangguan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang.

## **2.2. Hasil Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu bermanfaat penting untuk penelitian selanjutnya yaitu menjaga orisinalitas dan seringkali sebagai pembanding dalam penyusunan penelitian selanjutnya. Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu dengan menggunakan kerangka metodologi, teori, pembahasan analisa hingga penemuan yang mendukung penelitian ini. Lima artikel jurnal digunakan sebagai penelitian terdahulu yang memiliki benang merah terhadap penelitian ini. Benang merah dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pembahasan terkait Implementasi Spotmar TNI AL dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Penelitian terdahulu saling memberikan masukan yang berbeda. Mendukung orisinalitas pembaharuan temuan yang akan menjadi masukan hasil penelitian dan memudahkan dalam kajian. Kondisi penelitian yang terus berkembang akan menampilkan temuan terbaru yang akan memperkaya kajian terkait isu yang terdapat dalam kerangka berpikir tentang Keamanan Maritim. Tujuh penelitian terdahulu yang disertakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Bastari, Achmad (2018)**

Judul: Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/Jakarta)

Hasil Penelitian: Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tangerang, Banten Kesadaran Bela Negara di wilayah pesisir Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Anom masih rendah, Cinta tanah air, Kesadaran akan berbangsa dan benegara serta kemampuan awal bela negara dalam nilai-nilai bela negara belum tampak. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat pesisir tentang bela negara masih rendah, penerapan kesadaran bela negara dan peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran bela negara belum dilaksanakan.

Strategi TNI Angkatan Laut, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Bintahwil dan Komsos jika dilaksanakan sendiri tanpa sinergi dengan Pemda Kabupaten Tangerang pada khususnya dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga pada umumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan sulit terwujud. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir binaan Lantamal III/JKT cukup luas dan minimnya anggaran yang dikelola.

**2. Ghafur, Fakhry (2016)**

Judul: Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Hasil penelitian: Terdapat dua langkah yang dapat dijadikan solusi pengelolaan wilayah perbatasan Sebatik, antara lain pemberdayaan pembangunan berbasis potensi wilayah dan optimalisasi kerjasama lintas batas. Pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada, baik berupa sumber daya alam, sosial masyarakat, ekonomi, maupun kelembagaan.

Sementara itu, optimalisasi kerjasama lintas batas merupakan salah satu aspek penting yang juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan sosial wilayah perbatasan Sebatik dan perekonomian masyarakat kedua negara dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan lintas batas. Kedua langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan wilayah Sebatik sebagai sebuah wilayah di perbatasan yang terintegrasi dengan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Suhendi (2011)**

Judul: Model Desa Berketahanan Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Hasil Penelitian: Setiap instansi pemerintah ataupun swasta bahkan organisasi sosial/ lembaga swadaya masyarakat mempunyai konsep atau model dalam pelaksanaan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu model dari berbagai model yang dimiliki KEMENSOS RI yang telah diluncurkan dan diimplementasikan kalangan peneliti di lingkungan Badiklat Kessos adalah Model Desa Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Pranata Sosial. Model ini dalam pelaksanaannya menggunakan sasaran Pranata Sosial sebagai penggerak atau agen pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat komunitas lokal (desa/ kelurahan). Dengan penyusunan rencana aksi yang mengacu kepada 4 dimensi ketahanan sosial masyarakat.

#### **4. Lukman (2006)**

Judul: Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak dalam Konteks Penguatan Ketahanan Nasional.

Hasil penelitian: Untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, direkomendasikan strategi pembangunan yang tepat sasaran. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meninjau kembali rencana program dan kegiatan pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak yang sudah dibuat muluk-muluk, tetapi tidak bisa diwujudkan karena keterbatasan dana. Menghayalkan datangnya investor bonafit, konflik kewenangan, atau besar pasak dari tiang. Tepatnya, perlu dirancang rencana program dan kegiatan pembangunan yang realistis agar dapat dilaksanakan secara kongkret dan mampu memberikan kesejahteraan optimal kepada rakyat dengan skala prioritas mikro dan makro.

#### **5 A Giacometti et al. (2019)**

Judul: *Social and Economic Resilience in the Bothnian Arc Cross-Border Region.*

Hasil penelitian: Busur Bothnia adalah daerah lintas batas yang membentang dari kota Swedia Skellefteke Kokkola di Finlandia, di sepanjang wilayah pesisir yang mengelilingi Teluk Bothnia berbentuk tapal kuda. Terlepas dari lokasi pinggirannya, wilayah ini memiliki dua kota berukuran sedang yang relatif besar, yaitu Oulu di Finlandia, dan Luleå di Swedia. Wilayah lintas batas kaya akan sumber daya alam dan memiliki tradisi panjang industri ekstraktif, manufaktur, dan pengolahan berskala besar. Studi ini menunjukkan beberapa tantangan dan risiko lokal di Arc Bothnian, tetapi yang paling penting menunjukkan beberapa ancaman.

## 5. **Pauwelussen(2016)**

Judul: *Community as network: exploring a relational approach to social resilience in coastal Indonesia*

Hasil penelitian: Mempertimbangkan proliferasinya dalam studi maritim, konsep ketahanan sosial memerlukan refleksi kritis pada asumsi ontologis 'sosial' dan 'komunitas' yang mendasari konsep tersebut, khususnya gagasan bahwa komunitas berbasis tempat. Mengikuti pendekatan ontologis relasional, artikel ini mengusulkan untuk mengeksplorasi komunitas sebagai jaringan performatif hubungan manusia dan non-manusia yang dipraktikkan.

Mengambil wawasan dari penelitian etnografi di wilayah pesisir di Indonesia, penulis menggambarkan kinerja jaringan komunitas di luar skala lokal dan bagaimana mereka bertahan melalui asosiasi elemen sosial dan material. Komunitas trans-lokal ini telah menolak upaya para konservasionis untuk menciptakan komunitas nelayan yang tangguh (berbasis tempat) di wilayah tersebut untuk menghambat penangkapan ikan ilegal. Kasus tersebut mengilustrasikan bagaimana pendekatan relasional membantu menjelaskan apa arti ketahanan sosial dalam konteks maritim.

## 7. **Rilus A.Kinseng (2019)**

Judul: Resiliensi Sosial Dari Perspektif Sosiologi: Konsep dan Aplikasinya pada Komunitas Nelayan

Hasil penelitian: Konsep yang awalnya lebih dikenal dibidang ekologi ini, kemudian juga berkembang juga di bidang sosial, sehingga dikenal istilah resiliensi sosial. Beberapa ilmuwan sosial telah membuat definisi resiliensi social, namun terasa masih perlu dikritisi dari sudut pandang sosiologi. Tulisan ini bertujuan untuk membahas konsep resiliensi sosial tersebut dari perspektif sosiologi sebagai aplikasi dari konsep resiliensi sosial yang telah dibahas.

Nelayan kecil di Lampon telah mengalami berbagai gangguan, baik terhadap mata pencaharian maupun kehidupan mereka secara keseluruhan. Gangguan tersebut ada yang berasal dari luar (eksternal), seperti kondisi cuaca (perubahan iklim), kebijakan Pemerintah, hingga bencana alam tsunami. Namun demikian, ada juga yang berasal dari dalam, yaitu hubungan patron-klien yang menyebabkan harga jual ikan nelayan menjadi rendah. Dihadapkan dengan beragam “gangguan” tersebut, hingga saat ini nelayan kecil di Lampon mampu melakukan berbagai macam strategi untuk tetap mempertahankan kehidupan dan integrasi sosial mereka. Dengan kata lain, apabila ditinjau dari perspektif sosiologi, komunitas nelayan kecil di Lampon ini memiliki resiliensi sosial yang tinggi.

**Judul: Implementasi Program Spotmar TNI AL  
dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir  
Guna Mewujudkan Keamanan Maritim di Wilayah Perbatasan Sabang**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun dan Judul	Teori, Konsep, dan Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1.	Bastari, Ahmad (2018) Judul:Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/Jakarta)	Konsep/Teori: Pemberdayaan wilayah Pertahanan Laut/ Teori Sinergitas	Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tangerang, Banten Kesadaran Bela Negara di wilayah pesisir Desa Tanjung Pasir dan Tanjung Anom masih rendah, Cinta tanah air, Kesadaran akan berbangsa dan benegara serta kemampuan awal bela negara dalam nilai-nilai bela negara belum tampak. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat pesisir tentang bela negara masih rendah, penerapan kesadaran bela negara dan peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran bela negara belum dilaksanakan.  Strategi TNI Angkatan Laut, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Bintahwil dan Komsos jika dilaksanakan sendiri tanpa sinergi dengan Pemda Kabupaten Tangerang pada khususnya dan sinergi	Penelitian ini bisa menjadi rujukan karena sama-sama membahas mengenai Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut melalui Bakti TNI AL, Komsosmar dan Bintahwil.	Fokus pada peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat di wilayah perbatasan Laut dan PPKT

			dengan Kementerian/Lembaga pada umumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan sulit terwujud.		
2.	Ghafur(2016)  Judul: Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik	Teori/Konsep: Ketahanan Sosial <i>Border areas</i>  Metode: Penelitian Kualitatif	Terdapat dua langkah yang dapat dijadikan solusi pengelolaan wilayah perbatasan Sebatik, antara lain pemberdayaan pembangunan berbasis potensi wilayah dan optimalisasi kerjasama lintas batas. Pemberdayaan pembangunan yang terintegrasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada, baik berupa sumber daya alam, sosial masyarakat, ekonomi, maupun kelembagaan.  Sementara itu, optimalisasi kerjasama lintas batas merupakan salah satu aspek penting yang juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan sosial wilayah perbatasan Sebatik dan perekonomian masyarakat kedua negara dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan lintas batas. Kedua langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan wilayah Sebatik sebagai sebuah wilayah	Penelitian ini bisa menjadi rujukan karena sama-sama membahas mengenai proses ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan.	Selain perbedaan fokus kajian pada penelitian fokus pada program TNI AL.

			di perbatasan yang terintegrasi dengan pembangunan yang berkelanjutan.		
3.	Suhendi (2011)  Model Desa Berketahanan Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Teori/Konsep: Model Desa Berketahanan Sosial Pembangunan Kesejahteraan Sosial  Metode: Penelitian Kualitatif	Setiap instansi pemerintah ataupun swasta bahkan organisasi sosial/ lembaga swadaya masyarakat mempunyai konsep atau model dalam pelaksanaan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu model dari berbagai model yang dimiliki KEMENSOS RI yang telah ditelurkan, diluncurkan, dan diimplementasikan kalangan peneliti di lingkungan Badiklat Kessos adalah Model Desa Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Pranata Sosial.  Model ini dalam pelaksanaannya menggunakan sasaran Pranata Sosial sebagai penggerak atau agen pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat komunitas lokal (desa/ kelurahan). Dengan penyusunan rencana aksi yang mengacu kepada 4 dimensi ketahanan sosial masyarakat.	Penelitian ini membahas mengenai model desa/daerah berketahanan sosial yang bisa diterapkan juga di wilayah-wilayah perbatasan seperti Sabang, Merauke, dll.	Penelitian ini fokus pada pengembangan ketahanan sosial masyarakat melalui program SPOTMAR TNI AL, sedangkan riset ini fokus membahas kajian di KEMENSOS.
4.	Lukman (2006)	Teori/Konsep: <i>Border Region</i>	Untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di wilayah perbatasan	Penelitian ini membahas mengenai	Penelitian ini difokuskan pada

	Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak dalam Konteks Penguatan Ketahanan Nasional	<i>Development Strategy National Resilience</i>  Metode: Penelitian Kualitatif	Kalimantan Barat dengan Sarawak, direkomendasikan strategi pembangunan yang tepat sasaran.  Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah perlu meninjau kembali rencana program dan kegiatan pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak yang sudah dibuat muluk-muluk, tetapi tidak bisa diwujudkan karena keterbatasan dana. Menghayalkan datangnya investor bonafit, konflik kewenangan, atau besar pasak dari tiang. Tepatnya, perlu dirancang rencana program dan kegiatan pembangunan yang realistis agar dapat dilaksanakan secara kongkret dan mampu memberikan kesejahteraan optimal kepada rakyat dengan skala prioritas mikro dan makro.	strategy mencapai ketahanan di wilayah perbatasan	penguatan ketahanan nasional di wilayah perbatasan darat
5.	A Giacometti et al., (2019)  Judul: <i>Social and Economic Resilience in the Bothnian Arc Cross-Border Region</i>	Teori/Konsep: <i>Resilience Social Economic Bothnian Arc Cross-Border</i>	Busur Bothnia adalah daerah lintas batas yang membentang dari kota Swedia Skellefteke Kokkola di Finlandia, di sepanjang wilayah pesisir yang mengelilingi Teluk Bothnia berbentuk tapal kuda. Terlepas dari lokasi pinggirannya, wilayah ini memiliki dua	Penelitian ini membahas <i>social resilience</i> di <i>coastal zone</i> , strategi pengembangan juga didasarkan pada potensi sumberdaya	Perbedaan tipe sosial dan budaya masyarakat yang sedang dikaji.

		Metode: Mixed Methods	<p>kota berukuran sedang yang relatif besar, yaitu Oulu di Finlandia, dan Luleå di Swedia. Wilayah lintas batas kaya akan sumber daya alam dan memiliki tradisi panjang industri ekstraktif, manufaktur, dan pengolahan berskala besar.</p> <p>Studi ini menunjukkan beberapa tantangan dan risiko lokal di Arc Bothnian, tetapi yang paling penting menunjukkan beberapa ancaman global yang rentan terhadap semua kawasan, tanpa kecuali. Tujuannya adalah untuk menyoroti pentingnya kesadaran tren global dalam hal teknologi, politik dan iklim, untuk beradaptasi dengan perubahan dan membentuk jalur pembangunan kawasan yang sesuai. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan akademik dalam menyelesaikan permasalahan ini</p>	yang ada di wilayah tersebut.	
6.	<p>Pauwelussen(2016)</p> <p>Judul: <i>Community as network: exploring a relational approach to social</i></p>	<p>Teori/Konsep: <i>Social resilience</i> <i>Community, Network</i> <i>Relational ontology</i> <i>Patron-client relations</i> <i>Marine conservation</i></p>	<p>Konsep ketahanan sosial memerlukan refleksi kritis pada asumsi ontologis 'sosial' dan 'komunitas' yang mendasari konsep tersebut, khususnya gagasan bahwa komunitas berbasis tempat. Mengikuti pendekatan ontologis relasional, artikel ini mengusulkan untuk</p>	<p>Penjelasan yang relevan mengenai <i>social resilience</i> di masyarakat maritim di Indonesia.</p>	<p>Penelitian difokuskan pada kajian etnografi.</p>

	<i>resilience in coastal Indonesia</i>	<i>Illegal fishing Ethnography</i>  Metode: Penelitian Kualitatif	mengeksplorasi komunitas sebagai jaringan performatif hubungan manusia dan non-manusia yang dipraktikkan. Mengambil wawasan dari penelitian etnografi di wilayah pesisir di Indonesia, penulis menggambarkan kinerja jaringan komunitas di luar skala lokal dan bagaimana mereka bertahan melalui asosiasi elemen sosial dan material. Komunitas trans-lokal ini telah menolak upaya para konservasionis untuk menciptakan komunitas nelayan yang tangguh (berbasis tempat) di wilayah tersebut untuk menghambat penangkapan ikan ilegal. Kasus tersebut mengilustrasikan bagaimana pendekatan relasional membantu menjelaskan apa arti ketahanan sosial dalam konteks maritim.		
7	Rilus A.Kinseng (2019)  Judul: Resiliensi Sosial Dari Perspektif Sosiologi: Konsep dan Aplikasinya pada Komunitas Nelayan	Teori: Resiliensi sosial, Integrasi Sosial, Komunitas nelayan  Metode: Kualitatif	Konsep yang awalnya lebih dikenal dibidang ekologi ini, kemudian juga berkembang juga di bidang sosial, sehingga dikenal istilah resiliensi sosial. Beberapa ilmuwan sosial telah membuat definisi resiliensi social, namun terasa masih perlu dikritisi dari sudut pandang sosiologi.	Penelitian ini sama sama membahas tentang ketahanan/resiliensi sosial masyarakat nelayan yang rentan terhadap gangguan dengan indikator copiang capacities,	Penelitian ini di fokuskan pada nelayan di wilayah perbatasan

			<p>Nelayan kecil di Lampon telah mengalami berbagai gangguan, baik terhadap mata pencaharian maupun kehidupan mereka secara keseluruhan. Gangguan tersebut ada yang berasal dari luar (eksternal), seperti kondisi cuaca (perubahan iklim), kebijakan Pemerintah, hingga bencana alam tsunami. Namun demikian, ada juga yang berasal dari dalam, yaitu hubungan patron-klien yang menyebabkan harga jual ikan nelayan menjadi rendah.</p>	<p>adaptive Capacities dan Transformative capascitie</p>	
--	--	--	---	--	--

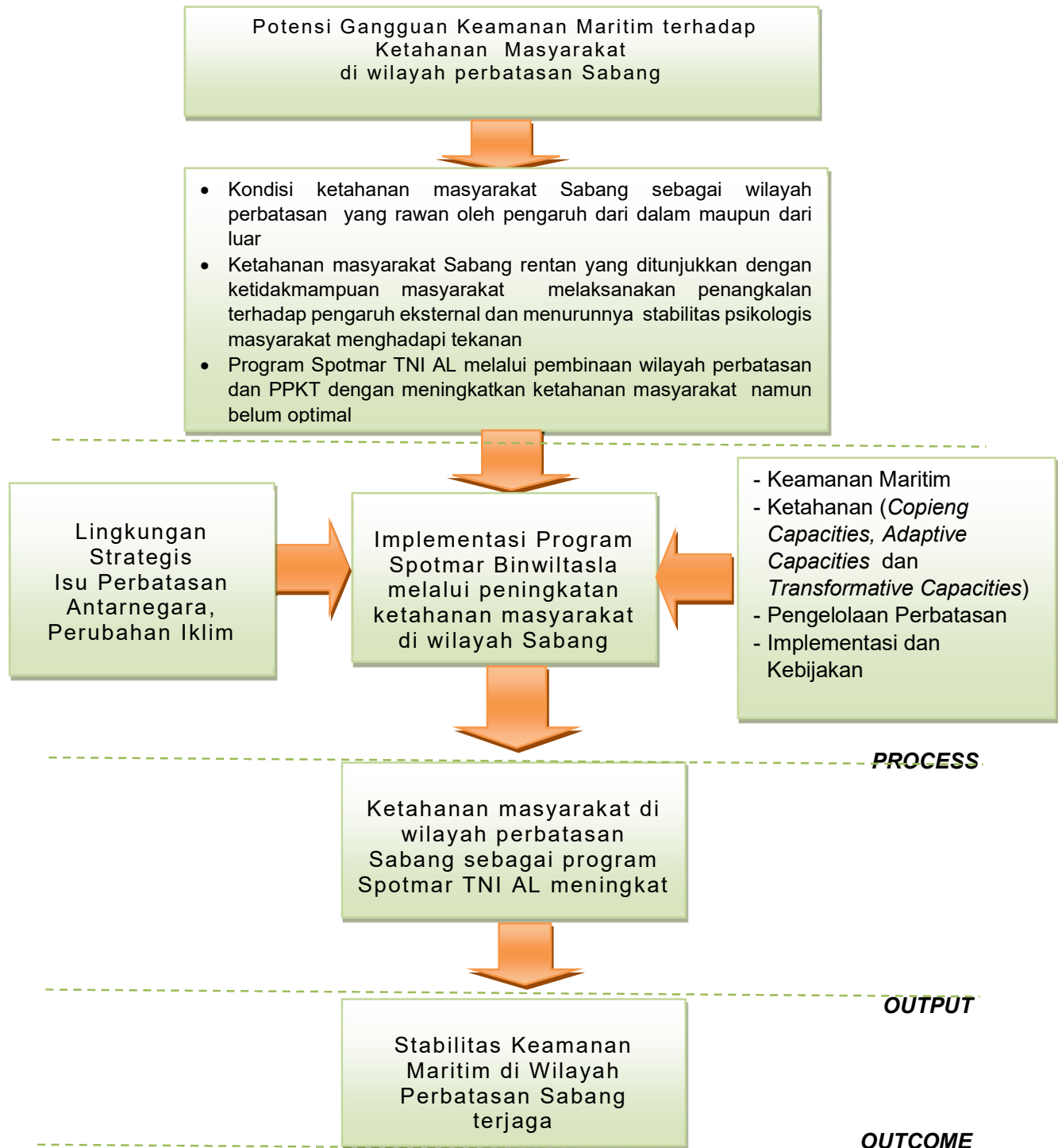
### 2.3. Kerangka Pemikiran

Adanya potensi gangguan keamanan maritim yang terjadi di wilayah perbatasan Sabang seperti *illegal fishing*, *distructive fishing*, perdagangan manusia, perdagangan narkoba hal ini berdampak pada permasalahan sosial di lingkungannya termasuk rentannya kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh eksternal, dihadapkan pada program Spotmar TNI AL yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Sabang sehingga dinilai belum optimal.

Dengan mengidentifikasi Sabang sebagai wilayah perbatasan yang dikategorikan rentan karena memiliki cakupan wilayah yang berbatasan langsung dengan India di kepulauan Nikobar, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis yaitu isu perbatasan negara dan isu perubahan iklim di wilayah perbatasan tersebut. Secara umum, penelitian ini akan mengkaji tentang ketahanan masyarakat sebagai program Spotmar TNI AL yang akan diimplementasikan di wilayah perbatasan Sabang. Ketahanan masyarakat ini bisa dilihat dari tiga dimensi yaitu *Coping Capacities* (kemampuan untuk menyelesaikan masalah), hal ini dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan masyarakat Sabang untuk menghadapi gangguan keamanan di wilayahnya dan kemudian bagaimana masyarakat untuk mengurangi dampak negative dari gangguan keamanan tersebut. *Adaptive Capacities* (kemampuan untuk beradaptasi) yang dapat dilihat dari seberapa tenang masyarakat dalam menghadapi permasalahan gangguan keamanan di wilayahnya dan seberapa besar kemampuan masyarakat untuk menjaga budaya lokalnya. Sedangkan *Transformative Capacities* (kemampuan bertransformasi) untuk mengkaji ketahanan masyarakat. dengan melihat sejauhmana kebijakan pemerintah dapat membawa nuansa perubahan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Sabang dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan politik.

Pada prosesnya, situasi faktual akan disandingkan dengan kondisi ideal untuk menemukan *gap* penelitian dan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dikaji. Konsep dan teori yang diusung berguna untuk merefleksi dan menjelaskan perilaku para aktor berdasarkan sudut pandang akademis. Sebagai pertimbangan, para pihak yang terlibat bisa mengimplementasikan kebijakan untuk selanjutnya akan berguna untuk mengurangi gangguan keamanan maritim di wilayah perbatasan Sabang. Untuk memahami narasi ini, perhatikanlah bagan berikut ini.

**Implementasi Program Spotmar TNI AL Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Guna Mewujudkan Keamanan Maritim Di Wilayah Perbatasan Sabang**



**Bagan 2.1** Kerangka Pemikiran